

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

Jl. Pembangunan Padang Harapan Telp (0736) 20091-22856
Fax (0736) 22856 BENGKULU



RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2016-2021

BENGKULU, JANUARI 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan komponen utama kehidupan yang terdiri dari Lingkungan Biotik dan Abiotik. Kombinasi interaksi komponen lingkungan ini yang menentukan daya dukung dan daya tampung untuk menunjang kehidupan. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka eksploitasi sumber daya alam semakin tinggi yang menyebabkan tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi sehingga daya dukungnya semakin menurun.

Salah satu komponen lingkungan biotik adalah hutan. Hutan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan kehutanan di Provinsi Bengkulu sangat luas dan kompleks yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam aspek sosial, kehutanan mengemban tugas dalam pemberdayaan masyarakat mengingat sekitar 40% masyarakat miskin dan tertinggal berada di dalam dan di sekitar hutan. Kondisi masyarakat (petani) ini sangat berkaitan dengan sumber daya yang dikuasai yaitu pada umumnya mempunyai lahan terbatas, modal terbatas, pendidikan rendah dan kemampuan memanfaatkan pasar terbatas, berorientasi jangka pendek dan kemitraan yang lemah. Dalam aspek ekonomi, pembangunan kehutanan yang mengelola kekayaan hutan harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam hutan disamping untuk memberi kemanfaatan masa kini juga harus menjamin kehidupan masa depan. Dalam era reformasi dan globalisasi yang terjadi saat ini harus diterima sebagai suatu kenyataan bahwa perubahan sistem dan struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan seluruh aspek kehidupan akan berdampak dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi Bengkulu. Dan setelah digulirkannya otonomi daerah maka dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan daerah

sesuai dengan kewenangan yang diserahkan dengan tetap memperhatikan masing-masing karakteristik wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Rancangan Awal RPJM Daerah 2016-2020 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas (RENSTRA OPD). Untuk Menjalankan RPJMD tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Bengkulu Menyusun RENSTRA DLHK Tahun 2016 -2020.

RENSTRA DLHK 2016-2020 merupakan jabaran dari visi misi Gubernur Terpilih Periode 2016-2020 yang telah disusun dalam RPJMD 2016 -2020. RENSTRA DLHK merupakan acuan kinerja DLHK Setiap Tahun dalam kurun waktu Lima Tahun. RENSTRA DLHK Memuat Visi,Misi,Tujuan, Sasaran Startegi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaanya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

9. Peraturan Presiden No.3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. (Lembar Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 4).
10. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (Lembar Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 17).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA Tahun 2016-2020 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
2. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
3. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk :

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan Sasaran, program, dan Tujuan Kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.
2. Memberikan informasi arahan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penyusunan Lakip dalam kurun waktu 2016-2020.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
3. Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu No. 51 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Susunan Organisasi DLHK terdiri atas :

Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan & Penegakan Hukum;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas;

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Dan Pengendalian Pencemaran
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - b. Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan KSDAE
5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
 - b. Seksi Penyuluhan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL), Polisi Hutan (Polhut), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

a. Sumber Daya Manusia (SDM) (526 org)

Sampai Tahun 2016 Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu sebanyak 520 Sebagai Berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	1	SD
2	SLTP	4	SLTP sederajat
3.	SLTA	70	SMU/SMK
4.	D3	9	
5.	STARATA 1	356	
6.	STARATA 2	86	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

2.3.1 Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Pemerintahan Daerah urusan lingkungan Hidup merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan kehutanan merupakan urusan pilihan. Urusan Wajib Pemerintahan yang wajib memiliki standar pelayanan Minimal (SPM) adalah urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : a). Pendidikan, b).Kesehatan, c). Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, d).Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, e).Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan f).Sosial.

Berdasarkan Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah provinsi diprioritaskan pada:

1. Informasi status mutu air.
2. Informasi Status Mutu Udara Ambien
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Perubahan peraturan perundangan ini tidak merubah esensi tugas pokok bidang lingkungan hidup. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu, memiliki berbagai bentuk jenis pelayanan kepada masyarakat yakni : layanan rekomendasi perizinan lingkungan; layanan penilaian kualitas air dan udara, layanan informasi lingkungan hidup, layanan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan layanan pengujian kualitas air di laboratorium. Kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu pada masingmasing jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Layanan rekomendasi Perizinan Lingkungan

Rekomendasi Izin lingkungan yang diproses oleh BLH Prov Bengkulu sebagai berikut :

No	Rekomendasi Izin Lingkungan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	AMDAL	3	5	10	4	6
2	UKL/UPL			2		2
3	Dokumen Evaluasi Lingkungan (DEL)	1				5
4	Addendum AMDAL					1

Dari table diatas untuk penyelesaian rekomendasi izin lingkungan belum di akomodir secara spesifik dalam kegiatan BLH selama ini. Diharapkan kedepanya dapat ditunjang dengan pendanaan agar dapat dilaksanakan lebih optimal berhasil guna.

b. Layanan Informasi Kualitas Air

Sungai sungai yang terdapat di provinsi Bengkulu memiliki peranan bagi masyarakat Bengkulu, seperti sumber air baku untuk berbagai kebutuhan industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Akan

tetapi, disisi lain, sumber-sumber air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Mengingat peran strategisnya, BLHD Provinsi Bengkulu, ditugaskan untuk memantau kualitasnya, menetapkan dan menginformasikan status mutu air dari berbagai sumber-sumber air tersebut yang menjadi kewenangannya.

No	Uraian	Tahun					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Sungai Yang Dipantau	3	3	3	3	3	Ketahun, Muara bangkahulu, Nelas
2	Sungai Lintas Kab/Kota	6	6	6	6	6	
3	Persentase Sungai Yang dipantau	50	50	50	50	50	

c. Layanan Informasi Kualitas Udara Ambient

Udara ambien yang dipantau dikelompokkan atas tiga kategori yaitu udara ambien pemukiman, jalan raya dan kawasan industri.

No	Uraian	Tahun					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kab/Kota Yang Dipantau	3	3	3	3	3	Seluma,Kota Bengkulu, Lebong
2	Jumlah Kab/Kota	10	10	10	10	10	
3	Persentase Udara Ambien yang dipantau	30	30	30	30	30	

d. Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Jumlah kasus sengketa yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Tahun					Ket
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Kasus/Sengketa LH	25	25	24	16	8	
2	Kasus/Sengketa Yang diselesaikan	22	21	24	16	8	
3	Persentase Kasus/Sengketa Yang diselesaikan	88%	84%	100 %	100 %	100%	

e. Layanan Pengujian Kualitas Air

Layanan pengujian kualitas air yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium LH BLH Prov Bengkulu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekarang Laboratorium Sudah Terakreditasi untuk beberapa Parameter Uji air dan Terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk Parameter Uji Udara, Tanah dalam beberapa tahun kedepan.

Tabel Capaian PAD UPTD Laboratorium Lingkungan

No	Tahun	Target PAD (Rp.)	Realiasi PAD(Rp.)	Capaian PAD
1	2011			
2	2012	5.796.000	44.631.000	770 %
3	2013	11.592.000	140.230.000	1210 %
4	2015	112.661.000	168.700.000	149 %
5	2015	157.909.000	220.450.000	140 %
6	2016	227.376.000	245.710.200	108.06%

Sumber : Data primer UPTLab LH

2.3.2 Pelayanan Bidang Kehutanan

2.3.2.1 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 1.991.933 Ha. Dari luas wilayah ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Menhut-II/2012 yang merevisi luas beberapa kawasan hutan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999, kawasan hutan di Provinsi Bengkulu adalah seluas 924.631 Ha, atau sekitar 46.41% dari luas daratan Provinsi Bengkulu. Hutan di Provinsi Bengkulu ini terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan konservasi.

Kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan kawasan lindung, yang berupa kawasan suaka dan pelestarian alam serta hutan lindung. Kondisi ini tentu memiliki tantangan sendiri dan memerlukan penanganan pengelolaan yang spesifik yang berbeda dengan pengelolaan kawasan yang didominasi hutan produksi. Dominannya keberadaan hutan konservasi dan lindung ini seringkali memang dianggap sebagai beban daripada peluang untuk berinovasi. Namun, di tengah semakin menguatnya isu perubahan iklim, program-program yang bersifat melestarikan hutan dan peningkatan tutupan hutan dapat menjadi unggulan. Secara umum kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, apalagi sejak bergulirnya era reformasi, mengalami tekanan yang cukup berat dari masyarakat akibat adanya berbagai kepentingan.

Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan tersebut perlu dilaksanakan pengamanan batas kawasan hutan agar pal batas tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan yang diakibatkan pengaruh lingkungan/alam ataupun pengaruh manusia.

2.3.2.2 Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan dan konservasi tanah

Kegiatan ini meliputi reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah. Reboisasi adalah kegiatan penanaman vegetatif yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan. Sedangkan penghijauan kegiatannya dilaksanakan diluar kawasan hutan dan dapat berupa penanaman secara vegetatif maupun secara sipil teknis. Kebijakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dimaksudkan untuk mempercepat pulihnya kondisi sumber daya hutan dan lahan yang rusak serta mempertahankan dan melindungi kawasan konservasi

dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Dalam kaitan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kayu, kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hutan tanaman yang produktif dan bernilai tinggi.

Disadari sepenuhnya bahwa upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini hasilnya belum seimbang dibandingkan dengan laju degradasi/kerusakan yang terjadi. Hal ini menyebabkan semakin parahnya kondisi hutan dan lahan apabila tidak segera ditangani secara terpadu dan terkoordinasi oleh berbagai pihak terkait dan stakeholder dengan pelibatan peran serta masyarakat secara aktif.

2.3.2.3 Produksi hasil hutan

Pemanfaatan hutan produksi yang dilaksanakan terbatas pada aspek produksi hasil hutan berupa kayu bulat. Hutan produksi yang terdapat di Provinsi Bengkulu pada umumnya adalah eks HPH yang telah berakhir sekitar tahun sembilan puluhan yang lalu. Penutupan vegetasinya sebagian kecil berupa virgin forest dan sebagian besar areal bekas tebangan/Log Over Area (LOA) berupa hutan sekunder dan semak belukar akibat perladangan berpindah dan pencurian kayu serta kebun-kebun perambah hutan.

Pada saat ini industri yang terdapat Provinsi Bengkulu berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Pemenuhan bahan baku industrinya berasal dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), produksi kayu rakyat, serta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA).

Potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu mempunyai kecenderungan menurun karena hanya dieksploitasi tanpa diimbangi dengan rehabilitasi/ penanamannya.

2.3.2. 4 Penegakan Hukum dalam kasus illegal logging

Kawasan hutan yang membentang di Provinsi Bengkulu makin terancam keberadaannya akibat perambahan dan penebangan liar, serta beroperasinya beberapa perusahaan besar non-kehutanan. Kawasan hutan ini tidak hanya dirusak oleh masyarakat sebagai peladang berpindah atau yang menetap, tapi juga rusak akibat dampak dari adanya beberapa perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang

canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

2.3.2. 5 Peningkatan perencanaan dan evaluasi bidang kehutanan

Proses perencanaan kehutanan merupakan tahap awal yang paling penting dari siklus pembangunan kehutanan, karena di dalam dokumen perencanaan itulah terkandung makna/hakikat pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi kehutanan di daerah.

Untuk membuat dokumen perencanaan baik pada masa mendatang perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan data-data yang dapat mendukung pembuatan dokumen perencanaan tersebut. Selanjutnya untuk monitoring pencapaian hasil perlu dilakukan kegiatan evaluasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Kekuatan (Strength)

1. Kawasan hutan mencakup wilayah yang luas dalam wilayah Provinsi, yakni sekitar 46.41% dari total luas wilayah Bengkulu.
2. Masyarakat mengetahui bahwa merambah hutan adalah hal yang tidak benar dan menyadari bahaya yang akan ditimbulkannya.
3. Hutan menyediakan berbagai jasa lingkungan penting.
4. Keberadaan instansi pemerintah pengelola kehutanan.
5. Berkembangnya kelompok tani hutan.
6. Akumulasi pengetahuan pengelolaan hutan.
7. Kondisi masyarakat yang kondusif.
8. Sudah ada bentuk-bentuk pengelolaan hutan pada tingkat tapak.

Kelemahan (Weakness)

1. Kesadaran dan Kepedulian parapihak yang masih kurang dalam pengelolaan lingkungan
2. Semakin Kompleknya Pencemaran dan Kerusakan Ekosistem
3. Pengelolaan kawasan belum dilaksanakan secara optimal.

4. Laju Pencemaran tidak sebanding dengan masa pemulihan lingkungan
5. Masyarakat sekitar kawasan belum dilibatkan secara maksimal dalam pengelolaan kawasan konservasi.
6. Belum adanya mekanisme insentif rehabilitasi hutan kepada pihak yang mengambil inisiatif.
7. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan.
8. Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam pembangunan hutan.

Peluang (Opportunity)

1. Adanya kebijakan pemberian izin restorasi hutan
2. Pengargaan Lingkungan yang semakin diminati
3. Meningkatnya perhatian dunia atas pelestarian hutan tropis dan Lingkungan Hidup
4. Adanya peluang pendanaan dari donatur
5. Kebijakan pengelolaan hutan partisipatif
6. Tingginya permintaan hasil hutan
7. Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

Ancaman (Threat)

1. Laju Pencemaran Lingkungan yang Tinggi
2. Kualitas Lingkungan yang semakin menurun
3. Banyak kawasan hutan bersinggungan dengan pemukiman.
4. Masih berlangsungnya perambahan hutan yang dilakukan masyarakat.
5. Persaingan penggunaan lahan hutan dengan aktifitas bernilai ekonomi tinggi.
6. Tingginya konflik pengelolaan hutan.
7. Tuntutan kontribusi PAD terhadap hasil hutan baik kayu maupun non-kayu.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan perlu diidentifikasi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan-sasaran-program sesuai dengan visi-misi yang diwujudkan.

Disamping itu untuk langkah-langkah kajian dan analisisnya diidentifikasi pula faktor-faktor kekuatan-kendala-tantangan-peluang.

3.1.1 Faktor Internal

- Kebijakan pengalokasian sumberdaya hutan belum sepenuhnya mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Demikian pula dengan hak adat/ulayat yang belum terakomodasikan secara jelas dalam sistem pengelolaan hutan selama ini.
Kondisi tersebut di atas menambah masalah perambahan kawasan hutan, pencurian kayu dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
- Rendahnya SDM sektor kehutanan sangat memberatkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
- Kelembagaan pengelolaan hutan belum didasari oleh multi-fungsi hutan, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi tidak terkelola dengan baik. Sedangkan pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung masih bersifat parsial belum terintegrasi dengan pembangunan wilayah.
- Kelangkaan dana pembagunan kehutanan, budaya kerja yang rendah, disiplin dan pelayanan publik yang lambat. Termasuk keterbatasan sarana dan prasarananya.

3.1.2 Faktor Eksternal

- Banyaknya konflik sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagaimana terindikasi oleh banyaknya perambahan/okupasi lahan hutan. Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menonjol kepada masyarakat di sekitar hutan, demikian pula manfaat pembangunan yang kurang dirasakan oleh daerah yang memiliki sumber daya hutan.
- Kecenderungan Pemerintah Daerah (Kab/Kota) untuk merubah kawasan hutan dalam proses penataan ruang penyusunan RTRWP dan RTRWK.
- Pengelolaan hutan belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesadaran akan pentingnya prinsip kelestarian yang belum membudaya, orientasi pada keuntungan jangka pendek, telah menyebabkan timbulnya degradasi sumber daya hutan pada tingkat yang mengkhawatirkan serta menurunnya kualitas lingkungan karena pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung dan rehabilitasi kawasan hutan serta pengamanan hutan kurang mendapat porsi yang memadai.
- Kebakaran hutan merupakan masalah besar yang secara nyata mengancam pula kelestarian sumberdaya hutan, sementara penanganannya belum berjalan baik.
- Kesenjangan bahan baku sebagai akibat kesenjangan antara kapasitas terpasang industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang jauh melebihi kemampuan hutan untuk menyediakan bahan baku secara lestari, akibat dari pada itu mendorong banyaknya penebangan liar. Sementara itu upaya pengembangan sumber daya hutan melalui pembangunan hutan tanaman belum memadai di Provinsi Bengkulu.
- Konversi kawasan hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan lahannya.
- Penegakan hukum (law enforcement) terhadap berbagai pelanggaran di bidang kehutanan masih lemah.
- Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- Meningkatnya pencemaran air sungai dan air laut
- Meningkatnya Jumlah Kendaraan bermotor yang menjadi sumber polusi udara
- Menurunnya kualitas tanah (degradasi lahan)

- Meningkatnya jumlah industri dan pertambangan yang kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup
- Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kurang tegasnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Bengkulu
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup untuk menguji kualitas lingkungan hidup lainnya
- Belum memadainya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) UPTD Laboratorium untuk menguji / analisis kualitas lingkungan hidup (dalam arti luas).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi gubernur terpilih periode 2016-2020 **“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing Tinggi”** Pada misi No.7 sudah memuat masalah lingkungan **Mewujudkan Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan**, Misi ini dapat dicapai melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

Visi dan Misi Gubernur ini memberikan amanat kepada DLHK untuk mengawal pengelolaan Sumber daya alam yang ada menggunakan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan agar pemanfaatan SDA tersebut berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka memformulasikan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, yaitu pada :

a. Misi kelima “Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah

Pada misi ini Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

1. Meningkatkan kinerja dan produksi hasil hutan pada hutan alam dan hutan tanaman.
2. Meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu dan investasi usaha jasa lingkungan.
3. Meningkatkan investasi dan produksi industri kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Optimalisasi ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan
5. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan

b. Misi ketujuh “Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

1. Meningkatkan areal kelola masyarakat melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan.
2. Meningkatkan kelompok usaha perhutanan sosial.
3. Meningkatkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan oleh unit-unit usaha masyarakat

c. Misi kedua belas “Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Pada misi ini Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

1. Terjaminnya pengelolaan kawasan pelestarian alam.
2. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari.
3. Memulihkan kesehatan Daerah Aliran Sungai dan lahan kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Meningkatkan pemantapan kawasan hutan untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.
5. Terjaminnya efektifitas dan jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

6. Meningkatkan efektifitas fasilitas dan dukungan operasional upaya penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Beberapa penghambat yang perlu diantisipasi antara lain :

- Perambahan, pencurian kayu dan penebangan liar yang belum dapat dihentikan.
- Ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan bahan baku kayu bulat.
- Banyaknya penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan
- Kebakaran hutan yang belum mampu di atasi dengan baik.
- Kualitas SDM kehutanan yang belum memadai
- Rendahnya keberhasilan hutan tanaman
- Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan
- Terjadinya konflik sosial di berbagai daerah
- Kondisi lapangan yang cukup berat, aksesibilitas rendah

Sedangkan beberapa peluang yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, antara lain :

- Kawasan hutan mencakup wilayah yang luas dalam wilayah Provinsi, yakni sekitar 46.7% dari total luas wilayah Bengkulu.
- Masyarakat mengetahui bahwa merambah hutan adalah hal yang tidak benar dan menyadari bahaya yang akan ditimbulkannya.
- Hutan menyediakan berbagai jasa lingkungan penting.
- Keberadaan instansi pemerintah pengelola kehutanan.
- Berkembangnya kelompok tani hutan.
- Akumulasi pengetahuan pengelolaan hutan.
- Kondisi masyarakat yang kondusif.
- Sudah ada bentuk-bentuk pengelolaan hutan pada tingkat tapak.
- Adanya kebijakan pemberian izin restorasi hutan
- Meningkatnya perhatian dunia atas pelestarian hutan tropis
- Adanya peluang pendanaan dari donatur
- Kebijakan pengelolaan hutan partisipatif
- Tingginya permintaan hasil hutan
- Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

Renstra KLHK bidang lingkungan hidup memiliki tujuan yang utama untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta berperan aktif dalam pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global. Tujuan ini juga sejalan dengan visi misi gubernur terpilih periode 2016-2020 dan di terjemahkan Menjadi indikator kinerja BLH.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi, antara lain: Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) berserta rencana rincinya, kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan hidup.

RTRW ditujukan untuk menyelaraskan perubahan atau perkembangan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ada, agar fungsi RTRW sebagai pedoman arahan perencanaan dan pembangunan dapat berfungsi secara optimal.

Melalui RTRW hendak mencapai sasaran :

1. Tersusunnya penyempurnaan rumusan pemanfaatan fungsi wilayah Kabupaten/kota..
2. Tersusunnya penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten/Kota.
3. Tersusunnya penyempurnaan arahan rancangan struktur ruang Kabupaten/kota.

4. Tersusunnya penyempurnaan arahan rencana kawasan strategis.
5. Tersusunnya penyempurnaan arahan pola ruang.
6. Tersusunnya penyempurnaan arahan implementasi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/kota, prioritas tahapan pembangunan (Indikasi Program).
7. Tersusunnya penyempurnaan rencana pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan zonasi, ketentuan perijinan, insentif dan disinsentif dan arahan sanksi).
8. Tersusunnya penyempurnaan arahan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang.

Terkait dengan penyusunan RTRW, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki relevansi yang tinggi di dalam konteks pembangunan daerah, dimana KLHS menawarkan dua manfaat utama yaitu :

1. Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL.
2. Mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dan ramah Lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu strategis

3.5.1. Identifikasi Isu –isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu dan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Bengkulu serta dari berbagai sumber sekunder lainnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis tersebut berjumlah 12 (dua belas) isu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
2. Masih banyaknya jumlah kawasan kumuh
3. Masih kurangnya kawasan terbuka hijau dalam wilayah perkotaan/pemukiman
4. Tekanan terhadap keanekaragaman hayati
5. Semakin menurunnya ketersediaan air
6. Menurunnya kualitas air
7. Tingginya penebangan / perambahan hutan (Illegal Logging)
8. Tingginya laju abrasi pesisir pantai

9. Tingginya laju kerusakan terumbu karang
10. Tingginya penangkapan ikan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku (Illegal Fishing)
11. Tingginya laju pencemaran atas aktivitas tambang batu bara
12. Kurangnya pengawasan dan ketegasan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dari identifikasi di atas dapat kami tuangkan dalam penentuan isu strategis sebagai berikut :

- A. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan
- B. Menurunnya kualitas lingkungan
- C. Peningkatan kapasitas PSDA dan LH
- D. Lemahnya kapasitas SDM dan Stake Holder

Yang dampaknya seperti :

1. Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditandai meningkatnya jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat.
2. Rendahnya tingkat ketaatan dunia usaha tentang peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman bagi sekolah (guru dan murid) tentang pengelolaan SDA dan lingkungan.
4. Meningkatnya tingkat kerusakan sedimentasi dan kualitas air sungai serta kerusakan sepadan sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kota sehat dan bersih (Adipura).
6. Meningkatkan pengawasan bahan perusak ozon (BPO)
7. Meningkatnya kerusakan keanekaragaman hayati flora dan fauna
8. Meningkatnya kerusakan hutan mangrove di pesisir laut lestari.

Usaha yang dapat dilakukan seperti :

1. Meningkatkan pengendalian terhadap dampak perubahan iklim dan gas rumah kaca
2. Melakukan kegiatan penanaman pohon atau penghijauan serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
3. Melakukan pemantauan kualitas udara di kawasan pemukiman, industri dan daerah transportasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan.
4. Melakukan pemulihan kerusakan di catchment area.
5. Pengendalian pencemaran Sungai Air Bengkulu
6. Pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan agroindustri dan pertambangan di Provinsi Bengkulu dalam mengendalikan pencemaran lingkungan
7. Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemaran air di Provinsi Bengkulu.
8. Pengendalian pencemaran air sebagai upaya mengurangi kerusakan ozon (O₃).
9. Pengendalian laju abrasi pantai sebagai upaya menjaga kelestarian pantai dan ketahanan terhadap isu global warming serta mendukung pariwisata di Provinsi Bengkulu.
10. Inventarisasi pengelolaan limbah B3 dan B3 pada perusahaan swasta dan pemerintah di Provinsi Bengkulu
11. Inventarisasi produksi Limbah B3 perusahaan swasta dan pemerintah di Provinsi Bengkulu.
12. Pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan swasta agroindustri dan pertambangan dalam mengendalikan Limbah B3 dan B3 di Provinsi Bengkulu.
13. Pengawasan Limbah B3 Rumah Sakit pada beberapa perusahaan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu.
14. Pengendalian limbah domestik di Provinsi Bengkulu.
15. Meningkatkan pelayanan dalam pengujian kualitas lingkungan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
16. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup untuk menguji kualitas lingkungan hidup lainnya.

17. Penyediaan sarana mobilitas untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
18. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) UPTD Laboratorium perlu adanya peningkatan, terutama untuk menguji/ analisis kualitas lingkungan hidup.

3.5.2. Identifikasi Isu –isu Strategis Bidang Kehutanan

Ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan hutan Bengkulu. Isu-isu ini baik bersifat internal sektor kehutanan, maupun berhubungan dengan faktor-faktor eksternal.

1. Pemantapan kawasan hutan

Kepastian dan kemantapan kawasan hutan memang menjadi prasyarat awal berjalannya program-program kehutanan secara baik. Pemantapan kawasan hutan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap, serta menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan. Pelaksanaan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan masih berjalan lambat karena beberapa permasalahan seperti keberadaan hak-hak pihak ketiga dan pelaksanaan tata batas itu sendiri, seperti kondisi alam dan kapasitas (jumlah dan kemampuan) pelaksana tata batas. Namun, karena hal ini penting dalam pengelolaan hutan, percepatan pemantapan kawasan hutan merupakan hal yang urgen. Secara nasional Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, yang bertanggung jawab terhadap penataan batas kawasan hutan, meluncurkan kebijakan percepatan pengukuhan kawasan hutan. Karena itu, untuk melaksanakan hal ini, pihak pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kehutanan

Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan luas kawasan akibat perubahan fungsi maupun peruntukan. Kawasan hutan di wilayah Provinsi Bengkulu pertama kali dibentuk pada masa kolonial Belanda, ditetapkan dan diundangkan sebagai hutan negara, namun secara terminologi hukum, kawasan hutan pertama kali dicantumkan pada UU No. 5 Tahun 1967 serta peraturan turunannya yaitu PP. No, 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

Pada Tahun 1985 pada tanggal 27 Desember 1985 Menteri Kehutanan menunjuk kawasan hutan di Propinsi Bengkulu melalui proses Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 383/Kpts-II/1985 tentang Penunjukan Areal Hutan di Propinsi Bengkulu seluas \pm 1.157.045 ha, dengan fungsi dan luas seperti tabel berikut :

Fungsi Kawasan	Luas ha
Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata	\pm 296.038
Hutan Lindung	\pm 441.090
Hutan Produksi Terbatas	\pm 213.916
Hutan Produksi Tetap	\pm 26.913
Hutan Produksi yang dapat di konversi	\pm 179.088
Jumlah	\pm 1.157.045

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, maka guna memaduserasikan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan yang juga merupakan bagian dari RTRWP Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor : 305 tahun 1998 tentang Pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, dengan rincian luas dan peruntukannya sebagai berikut :

Fungsi Kawasan	Luas ha
Kawasan Lindung	\pm 696.924
1. Kawasan Konversi	\pm 444.882
2. Hutan Lindung	\pm 252.042
Kawasan Budidaya	\pm 1.281.946
1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	\pm 182.210
2. Hutan Produksi Tetap (HP)	\pm 41.830
3. Areal Penggunaan Lain (APL)	\pm 1.057.906
Jumlah	\pm 1.978.870

Kemudian pada tahun 1999, dimana untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Provinsi, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menunjuk kawasan hutan di Propinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan Nomor : 420/ Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 ha, dengan rincian menurut fungsi hutan dan luas sebagai berikut :

Fungsi Kawasan	Luas ha
KSA/KPA	
1. Cagar Alam	± 6.723
2. Taman Nasional	± 405.286
3. Taman Wisata Alam/hutan Wisata	± 14.954
4. Taman Hutan Raya	± 1.123
5. Taman Buru	± 16.797
Hutan Lindung	± 252.042
Hutan Produksi Terbatas	± 182.210
Hutan Produksi Tetap	± 34.965
Hutan Fungsi Khusus (PLG)	± 6.865
Jumlah	± 920.964

Pada Tahun 2011 Gubernur Bengkulu mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di beberapa kelompok kawasan hutan, dan usulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.192 ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 31.013 ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 101 ha di Provinsi Bengkulu.

No.	Perubahan	Luas (Ha)
	<i>Perubahan Peruntukan</i>	
1	HL menjadi APL	399
2	HPT menjadi APL	1.453
3	HP menjadi APL	340
	JUMLAH	2.192

No.	Perubahan	Luas (Ha)
	<i>Perubahan fungsi</i>	
1.	CA. Menjadi TWA	3.212
2.	TB. Menjadi HL	398
3.	HL. Menjadi HPT	5.358
4.	HPT. Menjadi TAHURA	485
5.	HPT. Menjadi TWA	1.412
6.	HPT. Menjadi HPK	2.329
7.	HP. Menjadi TWA	6.325
8.	HP. Menjadi HPT	2.060
9.	HP. Menjadi HPK	9.434
	JUMLAH	31.013
	<i>Penunjukan Kawasan</i>	
1.	APL Menjadi TAHURA	101
	JUMLAH	101

Terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012, luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu menjadi 924.631 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Data Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : 784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam	462.965
a.	Cagar alam	4.300
b.	Taman nasional	412.325
c.	Taman wisata alam	27.630
d.	Taman hutan raya	1.748
e.	Taman buru	16.962
2.	Hutan lindung	250.750
3.	Hutan Produksi	210.916
a.	Hutan produksi terbatas	173.280
b.	Hutan produksi tetap	25.873
c.	Hutan produksi konversi	11.763
	TOTAL	924.631

2. Rehabilitasi hutan yang terdegradasi

Kawasan hutan yang membentang di Provinsi Bengkulu makin terancam keberadaannya akibat perambahan dan penebangan liar, serta beroperasinya beberapa perusahaan besar non-kehutanan. Kawasan hutan ini tidak hanya dirusak oleh masyarakat sebagai peladang berpindah atau yang menetap, tapi juga rusak akibat dampak dari adanya beberapa perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan. Untuk perusahaan pertambangan misalnya, adanya pembukaan hutan untuk pembuatan jalan telah membuka akses bagi para perambah untuk masuk hutan, bahkan di beberapa tempat kegiatan reklamasi bekas tambang juga tidak dilakukan dengan baik. Adanya perkebunan besar sawit di Bengkulu juga memacu masyarakat untuk memperluas lahan kebunnya dengan merambah kawasan hutan. Pada kawasan hutan lindung, kegiatan pengelolaan hutan seringkali hanya dilakukan secara sporadis, dan sebagian besar berupa kegiatan pengamanan kawasan, tanpa ada satuan unit rencana pengelolaan yang utuh dan menyeluruh. Kegiatan

pengelolaan hutan lindung juga tidak dilakukan oleh pengelola yang berada pada tingkat tapak.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, dari hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, yang tutupan masih sangat baik adalah taman nasional dengan tutupan hutan primer masih berkisar 76% dan hutan sekunder sebesar 16% dari luas yang ada. Namun, kawasan konservasi yang lain seperti cagar alam dan taman wisata alam mengalami perubahan tutupan yang signifikan. Sekitar 69% cagar alam sudah tidak berhutan dan sekitar 67% taman wisata alam sudah kehilangan tutupan hutan. Kawasan hutan lindung yang tutupannya masih berupa hutan primer adalah sekitar 42% dan berbentuk hutan sekunder sebesar 33%. Artinya luas hutan lindung yang tidak berhutan mencapai hampir 25% dari 250.750 ha. Sedangkan hutan produksi tetap yang berupa hutan primer tinggal sekitar 13% dan hutan sekunder sebesar 52%. Hutan produksi terbatas telah kehilangan tutupan hutan 50% dengan menyisakan 10% area hutan primer dan 40% hutan sekunder (Data diolah dari Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan, 2011). Degradasi hutan Bengkulu dapat dikatakan cukup besar. Karena itu, rehabilitasi kawasan hutan harus dilakukan.

3. Jenis hasil hutan yang dikembangkan

Secara garis besar hasil hutan dibagi menjadi 2 bagian yaitu hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan non kayu. Hasil hutan non kayu terdiri dari produk nabati dan hewan. Untuk hasil hutan non kayu nabati bisa dikelompokkan ke dalam kelompok rotan, kelompok bambu dan kelompok bahan ekstraktif (misalnya Damar, Terpentin, Kopal, Gondorukem dan sebagainya). Jenis hasil hutan yang telah dikembangkan di Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015 sebanyak 2 jenis yaitu kayu dan rotan.

4. Perlindungan dan pengamanan hutan yang belum maksimal.

Secara umum, laju deforestasi pada kawasan hutan di Provinsi Bengkulu setiap tahunnya mencapai 1%. Berdasarkan data penafsiran citra satelit Tahun 2013, laju deforestasi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2014 mencapai 1,31%. Perubahan lahan hutan menjadi tak berhutan ini sebagian

menjadi area non vegetasi, semak belukar, perkebunan ataupun lahan pertanian lainnya.

Penyebab utama kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu adalah eksploitasi yang berlebihan, termasuk penebangan liar dan konversi ke penggunaan lainnya, lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, kurangnya perlindungan hutan dan konservasi, kurangnya kesadaran pada fungsi hutan dan tekanan ekonomi.

5. Rendahnya pemahaman akan pentingnya fungsi hutan dan mengapa pengelolaan hutan diperlukan

Pentingnya keberadaan kawasan hutan tidak populer di masyarakat dan terkesan kawasan hutan tidak ada manfaatnya. Hal ini bisa terlihat dari ketidakpedulian sebagian masyarakat atas keberadaan suatu kawasan hutan yang berada disekitarnya. Masyarakat juga seringkali tidak mengerti bahwa beberapa kebutuhan pokok hidupnya tergantung pada kawasan hutan yang ada disekitar tempat hidupnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan hutan dan kurangnya pengetahuan mengenai fungsi-fungsi kawasan hutan dan keterkaitannya dengan kehidupan mereka mengindikasikan perlunya usaha lebih keras bagi pengelola kawasan hutan untuk meningkatkan penyuluhan tentang fungsi dan pentingnya kawasan hutan. Di beberapa kawasan bahkan masyarakat tidak tahu bahwa diwilayahnya terdapat kawasan hutan yang harus dijaga fungsi dan kelestariannya.

Dalam hal pengelolaan kawasan hutan, seringkali masyarakat dan aparatur pemerintah tidak mengerti mengapa kawasan hutan harus dikelola. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa perlu adanya pengelola kawasan ditingkat tapak, mengapa suatu kawasan perlu dikelola sebagai cagar alam, mengapa bukan sebagai taman wisata alam, mengapa mesti menjadi tahura, mengapa jadi hutan lindung atau sebaliknya seringkali tidak terjawab. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu kawasan hutan perlu dikelola dengan sistem tertentu tidak dapat dijelaskan.

Pertanyaan-pertanyaan lebih detail seperti mengapa luas kawasan harus ditetapkan sebesar tertentu, mengapa ada penetapan luas kawasan yang berubah dan sebagainya sering kali tidak bisa dijelaskan dengan baik. Pengetahuan yang diketahui kadang hanya berupa bahwa suatu kawasan telah ditetapkan berdasar surat keputusan sebagai suatu kawasan tertentu, tanpa ada penjelasan mengapa dan bagaimana.

Rendahnya pemahaman tentang perlunya pengelolaan suatu kawasan hutan, terutama yang terjadi pada pengelola kawasan konservasi dan lindung, menyebabkan lemahnya argumentasi untuk bisa mempertahankan kepentingan pengelolaan suatu kawasan hutan, pada saat kepentingan lain memerlukan kawasan tersebut untuk tujuan lain. Untuk kawasan hutan lindung dan konservasi, pemahaman bahwa kegiatan konservasi adalah kegiatan yang preservatif dan statis masih juga sering terungkap, bahwa kegiatan konservasi atau lindung juga bisa merupakan kegiatan pengelolaan kawasan yang produktif seringkali tidak terkemukakan.

6. Perluasan ruang kelola masyarakat

Timbulnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun swasta dalam hal pengelolaan hutan antara lain karena terbatasnya ruang kelola yang mereka miliki. Masyarakat sering merasa dianaktirikan karena melihat pihak swasta bisa mengusahakan hutan, namun mereka tidak bisa. Dengan semakin berkembangnya skema-skema yang dapat melibatkan masyarakat, maka ruang kelola masyarakat dapat diperluas. Pengembangan program hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan ataupun hutan desa dapat menjadi sarana pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun, masyarakat juga harus diedukasi bahwa pengelolaan hutan memiliki batasan-batasan. Karena itu, pemberian ruang kelola yang lebih besar kepada masyarakat harus juga diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Tahun 2014 tutupan lahan kawasan hutan Provinsi Bengkulu dengan luas 924.631 ha terdiri dari Hutan Primer seluas 438.730,37 ha, Hutan Sekunder seluas 220.816,04 ha, dan Tidak Berhutan seluas 265.084,59 ha. Sedangkan luas kawasan hutan yang tidak

berhutan yang berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi seluas 253.261,13 ha terdiri dari :

No.	Kawasan	Luas (Ha)
1	Perkebunan	8.647,87
2	Semak Belukar	41.174,53
3	Belukar Rawa	623,95
4	Pertanian Lahan Kering Campur	190.333,85
5	Pertanian Lahan Kering	1.530,16
6	Savanna/ Padang rumput	277,66
7	Pemukiman	1.154,82
8	Tanah Terbuka	6.290,62
9	Sawah	3.227,67
	Jumlah	253.261,13

Hingga tahun 2015 luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat sudah mencapai 48.000 ha sehingga masih terdapat 205.261,13 ha yang belum dikelola oleh masyarakat.

7. Otonomi daerah

Penerapan otonomi daerah telah membawa konsekuensi luas dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut telah membuka negosiasi-negosiasi baru mengenai kuasa pengelolaan sumber daya alam, serta desentralisasi sejumlah kebijakan pusat dalam hal pengelolaan sumber daya alam ke daerah. APBD merupakan pencerminan pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat bekerja mencapai sasaran tujuan pembangunan. Desentralisasi sejumlah kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan mempengaruhi posisi kawasan hutan.

Adanya pemahaman bahwa kegiatan kehutanan masih dianggap sebagai kegiatan yang hanya menghabiskan biaya dan tidak menghasilkan pemasukan PAD. Hal ini menyebabkan terjadi konflik kepentingan pengelolaan kekayaan SDA di daerah yang berorientasi pencapaian PAD berhadapan dengan misi perlindungan dari kawasan hutan. Sampai saat ini hutan terutama kawasan hutan konservasi dan lindung masih dipahami sebagai kegiatan yang menghabiskan biaya karena secara ekonomi kawasan ini tidak bisa digolongkan bisa menjadi produk yang kompetitif. Hal ini nampak dengan adanya keinginan dari beberapa

pemerintah daerah untuk mengubah kawasan hutan menjadi kawasan produksi lainnya.

9. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang kehutanan harus terus dilakukan. Walaupun secara kuantitas cukup banyak personil yang ada di institusi kehutanan di Bengkulu, tetapi sebagian besar sumberdaya manusia yang ada masih cenderung berorientasi di bidang kehutanan saja. Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan hutan secara komprehensif masih perlu ditingkatkan. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan SDM juga masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan pengelolaan kawasan hutan yang sangat meluas (tidak hanya masalah teknis kehutanan ataupun konservasi saja), pengelola kawasan hutan akan dituntut untuk dapat melengkapi sumber daya manusianya dengan pengetahuan ataupun ketrampilan bidang-bidang lain. Oleh karena itu pelibatan sumber daya manusia bidang-bidang lain perlu untuk diperkuat dan tingkatkan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya lingkungan dan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Persentase KPH yang memproduksi Barang dan Jasa			-	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kawasan Hutan yang dikelola melalui perhutanan sosial		40%	50%	55%	65%	70%	75%	75%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			66	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
			Persentase penurunan Emisi gas Rumah Kaca (GRK)			29%	29%	29%	29%	29%	29%
		Meningkatnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan Hidup secara lestari	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat setiap tahun			2%	2%	2%	2%	2%	10%
			Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan			20%	20%	20%	20%	20%	205
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Manfaat Hutan Secara Lestari.
Meningkatkan nilai tambah hasil hutan ikutan	Melaksanakan kerjasama antara masyarakat, industri dan pihak yang terkait
Mempertahankan fungsi hutan	pemulihan lahan sangat kritis dan kritis
Meningkatkan Transparasi Kebijakan Serta Mengoptimalkan Pembangunan Kehutanan	Peningkatan perencanaan dan evaluasi bidang kehutanan
Meningkatkan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan	Mengoptimalkan Kegiatan Pengamanan Hutan dan Mewujudkan Penanganan/Pengendalian Kebakaran Hutan Yang Komprehensif.
Memastikan Keberadaan Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Hutan Untuk Pencapaian Hutan Lestari	Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan
Pengembangan dan peningkatan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	Mengembangkan dan meningkatkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan pengelolaan LH dalam Upaya Efektifitas pengelolaan, Konservasi dan rehabilitasi SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. - Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam pengelolaan dan pelestarian LH berbasis adat istiadat dan kearifan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menata kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum - Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan kearifan lokal - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah. - Menggali potensi sumber daya yang terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders.

RENCANA SASARAN, INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF OPD PROVINSI BENGKULU

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Jumlah jenis administrasi perkantoran yang di laksanakan	14 jenis	14 jenis	2.573.053.000	14 jenis	2.573.053.000	14 jenis	2.573.053.000	14 jenis	2.573.053.000	14 jenis	2.573.053.000	14 jenis	12.865.265.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan surat menyurat	3875 Surat	3875 Surat	20.000.000	3875 Surat	20.000.000	3875 Surat	20.000.000	3875 Surat	20.000.000	3875 Surat	20.000.000	3.875 Surat	100.000.000
		Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Kominikasi, Air dan Listrik	12 Rekening	12 Rekening	250.000.000	12 Rekening	250.000.000	12 Rekening	250.000.000	12 Rekening	250.000.000	12 Rekening	250.000.000	12 Rekening	1.250.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang dibayar	Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayar	22 Orang	22 Orang	166.560.000	22 Orang	166.560.000	22 Orang	166.560.000	22 Orang	166.560.000	22 Orang	166.560.000	22 orang	832.800.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	13 Orang	13 Orang	366.141.000	13 Orang	366.141.000	13 Orang	366.141.000	13 Orang	366.141.000	13 Orang	366.141.000	33 Orang	1.830.705.000
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis	156.200.000	20 Jenis	156.200.000	20 Jenis	156.200.000	20 Jenis	156.200.000	20 Jenis	156.200.000	20 jenis	781.000.000
		Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis	77.000.000	9 Jenis	77.000.000	9 Jenis	77.000.000	9 Jenis	77.000.000	9 Jenis	77.000.000	9 jenis	385.000.000
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang bertambah	360 buah	360 buah	31.000.000	360 buah	31.000.000	360 buah	31.000.000	360 buah	31.000.000	360 buah	31.000.000	349 buah	155.000.000
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Majalah/Koran yang dibeli	4015 eksemplar	4015 eksemplar	27.000.000	4015 eksemplar	27.000.000	4015 eksemplar	27.000.000	4015 eksemplar	27.000.000	4015 eksemplar	27.000.000	60 buah/set/ unit	135.000.000
		Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara terpenuhi	100 Orang	100 Orang	398.000.000	100 Orang	398.000.000	100 Orang	398.000.000	100 Orang	398.000.000	100 Orang	398.000.000	4.015 Eksemplar	1.990.000.000
		Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	Jumlah Pembayaran Petugas Penatausahaan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	80 Orang	125.000.000
		Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor yang diselenggarakan	14 Orang	14 Orang	327.105.000	14 Orang	327.105.000	14 Orang	327.105.000	14 Orang	327.105.000	14 Orang	327.105.000	12 Bulan	1.635.525.000
		Kegiatan Publikasi Pemb. Prov Bengkulu Bidang LHK	Jumlah Publikasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6 Event	6 Event	350.000.000	6 Event	350.000.000	6 Event	350.000.000	6 Event	350.000.000	6 Event	350.000.000	12 Bulan	1.750.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	332.891.000	12 Bulan	332.891.000	12 Bulan	332.891.000	12 Bulan	332.891.000	12 Bulan	332.891.000	4 orang	1.664.455.000
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga bertambah	60 buah/set/jenis	60 buah/set/jenis	46.156.000	60 buah/set/jenis	46.156.000	60 buah/set/jenis	46.156.000	60 buah/set/jenis	46.156.000	60 buah/set/jenis	46.156.000	16 Event	230.780.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prsarana perkantoran yang diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara	100 % dari yang dianggarkan	100 % dari yang dianggarkan	568.000.000	100 % dari yang dianggarkan	2.454.700.000	100 % dari yang dianggarkan	568.000.000	100 % dari yang dianggarkan	568.000.000	100 % dari yang dianggarkan	568.000.000	100 % dari yang dianggarkan	4.726.700.000
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor bertambah	42 unit	42 unit	100.000.000	42 unit	100.000.000	42 unit	100.000.000	42 unit	100.000.000	42 unit	100.000.000	252 unit	500.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	25 Unit	25 Unit	200.000.000	25 Unit	200.000.000	25 Unit	200.000.000	25 Unit	200.000.000	25 Unit	200.000.000	300 Unit	1.000.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung/Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysg dipelihara	52 unit	52 unit	100.000.000	52 unit	100.000.000	52 unit	100.000.000	52 unit	100.000.000	52 unit	100.000.000	260 unit	500.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Ruangan Kantor yang dipelihara	16 unit	16 unit	168.000.000	16 unit	168.000.000	16 unit	168.000.000	16 unit	168.000.000	16 unit	168.000.000	125 kendaraan	840.000.000
		Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang diadakan				526 Stel	236.700.000							526 Stel	236.700.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	2 unit			2 unit	400.000.000							4 unit	400.000.000
		Pembuatan Rambu Peringatan Kehutanan	Jumlah Rambu Peringatan yang dibuat				1 Paket	200.000.000							1 Paket	200.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana kantor UPTD KPH	Jumlah KPH yang diadakan sarana prasarananya				7 Unit	800.000.000							7 Unit	800.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target
		Pengadaan Seragam POLHUT, PEH, PENYULUH Kehutanan Dan Fungsional LH	Jumlah Pakaian Seragam yang diadakan				1 Paket	200.000.000							1 Paket	200.000.000
		Pengadaan Drone	Jumlah Drone yang diadakan				1 Unit	50.000.000							1 Unit	50.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	12 orang	72 orang	180.000.000	72 orang	180.000.000	72 orang	180.000.000	72 orang	180.000.000	72 orang	180.000.000	72 orang	900.000.000
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM LHK yang mengikuti Diklat	12 Orang	12 Orang	80.000.000	12 Orang	80.000.000	12 Orang	80.000.000	12 Orang	80.000.000	12 Orang	80.000.000	72 Orang	400.000.000
		Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Penilaian DUPAK Fungsional DLHK		60 orang	100.000.000	60 orang	100.000.000	60 orang	100.000.000	60 orang	100.000.000	60 orang	100.000.000	300 orang	500.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yg disusun	16 dokumen yang dihasilkan	16 dokumen yang dihasilkan	385.000.000	16 dokumen yang dihasilkan	385.000.000	16 dokumen yang dihasilkan	235.000.000	16 dokumen yang dihasilkan	285.000.000	16 dokumen yang dihasilkan	310.000.000	96 dokumen	1.600.000.000
		Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	350.000.000	8 Dokumen	350.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	250.000.000	8 Dokumen	275.000.000	48 dokumen	1.425.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan	Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan terpenuhi	8 Dokumen	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	48 dokumen	175.000.000
Meningkatnya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Persentase KPH yang memproduksi barang dan jasa	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah Usaha yang dikembangkan oleh KPH			0	0	200.000.000	7 usaha	1.870.000.000	7 usaha	1.590.000.000	7 usaha	1.590.000.000	7 usaha	5.250.000.000
		Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan kayu	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan				2 Potensi	200.000.000							2 Potensi	200.000.000
		Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH Mukomuko	Jumlah koloni yang diadakan						30 Koloni	75.000.000					30 Koloni	75.000.000
		Kegiatan Pengembangan Lebah Madu pada KPH Bukit Daun	Jumlah koloni yang diadakan						30 Koloni	110.000.000					30 Koloni	110.000.000
		Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan	Jumlah dokumen yang tersedia						1 dokumen	105.000.000					1 dokumen	105.000.000
		Kegiatan Pengembangan Blok HPT KPH Bengkulu Utara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan						1 Kegiatan	200.000.000					1 Kegiatan	200.000.000
		Pendampingan Kelompok Perhutanan Sosial pada KPH Bengkulu Selatan	Luas kawasan yang diinventarisasi						500 ha	50.000.000					500 ha	50.000.000
		Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin pada KPH Bukit Daun	Jumlah izin yang dipantau dan dibina						21 izin	150.000.000					21 izin	150.000.000
		Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan yang berizin pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan						1 Kegiatan	105.000.000					1 Kegiatan	105.000.000
		Kegiatan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati	Data keanekaragaman hayati						1 dokumen	105.000.000					1 dokumen	105.000.000
		Kegiatan Inventarisasi Potensi Tegakan pada KPH Bengkulu Selatan	Luas kawasan yang diinventarisasi						6.000 ha	150.000.000					6.000 ha	150.000.000
		Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH	Jumlah Kelompok yang difasilitasi						5 KTH	150.000.000	5 KTH	150.000.000	5 KTH	150.000.000	15 KTH	450.000.000
		Monitoring dan pembinaan KPH	Jumlah KPH yang dimonitoring						7 KPH	105.000.000	7 KPH	105.000.000	7 KPH	105.000.000	21 KPH	315.000.000
		Monitoring Penggunaan Kawasan	Jumlah izin yang dimonitoring						5 izin	250.000.000	5 izin	250.000.000	5 izin	250.000.000	15 izin	750.000.000
		Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah data potensi yang dihasilkan						1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	3 dokumen	315.000.000
		Kegiatan Inventarisasi Potensi Wilayah Tertentu pada KPH Bukit Daun	Jumlah data potensi yang dihasilkan						1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	3 dokumen	315.000.000
		Kegiatan Inventarisasi berkala Wilayah Tertentu pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah data potensi yang dihasilkan						1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	3 dokumen	315.000.000
		Kegiatan Inventarisasi berkala Wilayah Tertentu pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah data potensi yang dihasilkan								1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	105.000.000	2 dokumen	210.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target
	Persentase kawasan hutan yang dikelola melalui perhutanan sosial	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Luas hutan yang dikelola masyarakat (ha)	31.535 Ha	49.990 Ha	843.100.000	72.847 Ha	1.545.000.000	83.192 ha	1.925.000.000	95.322 ha	1.925.000.000	107.452 ha	1.925.000.000	107.452 ha	8.163.100.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan HKm/Hutan Desa	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	3 Lembaga/desa	3 Lembaga/desa	443.100.000									6 Lembaga/desa	443.100.000
		Pemberdayaan dan Pengendalian Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Desa yang diberdayakan		1 Desa/Unit	100.000.000									3 Lembaga/desa	100.000.000
		Pemberdayaan dan Pengendalian Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Desa yang diberdayakan		1 Desa/Unit	100.000.000									1 Desa/Unit	100.000.000
		Pemberdayaan dan Pengendalian Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Kaur	Jumlah Desa yang diberdayakan		1 Desa/Unit	100.000.000									1 Desa/Unit	100.000.000
		Pemberdayaan dan Pengendalian Pembangunan Perhutanan Sosial pada KPH Bukit Daun	Jumlah Desa yang diberdayakan		1 Desa/Unit	100.000.000									1 Desa/Unit	100.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah Lembaga yang difasilitasi				3 Lembaga	150.000.000							3 Lembaga	150.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Muko-Muko	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	75.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	390.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	75.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	390.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Bukit Daun	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	100.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	415.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	75.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	390.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Seluma	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	75.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	390.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial Pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan				1 Lembaga	75.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	1 Lembaga	105.000.000	4 Lembaga	390.000.000
		Peningkatan Pembinaan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu	Jumlah KTH yang ditingkatkan dari Pemula menjadi Madia				5 KTH	120.000.000	5 KTH	120.000.000	5 KTH	120.000.000	5 KTH	120.000.000	20 KTH	480.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Muko-Muko	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	4 Desa/Unit	415.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	100.000.000	4 Desa/Unit	400.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Seluma	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	4 Desa/Unit	415.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	4 Desa/Unit	475.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	4 Desa/Unit	415.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Kaur	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	100.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	1 Desa/Unit	105.000.000	4 Desa/Unit	415.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Bukit Daun	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang mendapat Bantuan				1 Desa/Unit	125.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	1 Desa/Unit	125.000.000	4 Desa/Unit	500.000.000
		Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perhutanan Sosial	Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang						5 Gapoktan/ Lembaga/Desa	150.000.000	5 Gapoktan/ Lembaga/Des	150.000.000	5 Gapoktan/ Lembaga/Desa	150.000.000	15 Gapoktan/ Lembaga/Desa	450.000.000
		Monitoring dan pembinaan izin penatausahaan hasil hutan	Jumlah dokumen yang tersedia						1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	3 dokumen	450.000.000
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat	3,11% (33.668,64 ha)	3,16% (34.209,94 ha)	500.000.000	3,21%	4.465.000.000	3,26%	885.000.000	3,31%	555.000.000	3,36%	555.000.000	3,36%	6.960.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target
		Pengembangan Hutan Bambu di Tahura	Jumlah Koleksi Tanaman Bertambah		6000 batang	250.000.000									6000 batang	250.000.000
		Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Jumlah Bahan Baku Industri Bertambah		11 batang	250.000.000									11 batang	250.000.000
		Pengadaan bibit tanaman hutan	Jumlah Bibit Tanaman yang diadakan				36000 Batang	3.000.000.000							36000 Batang	3.000.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor KPH	Jumlah KPH yang ditingkatkan sarana prasarana				7 Unit	1.400.000.000							7 Unit	1.400.000.000
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS pada IPPKH	Jumlah Dokumen Evaluasi Rehab DAS IPPKH yang disusun				1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	515.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Mukomuko	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Bukit Daun	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Seluma	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah bibit yang dibuat						50.000 batang	105.000.000	50.000 batang	105.000.000	50.000 batang	105.000.000	75.000 batang	315.000.000
		Kegiatan Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan pada KPH Kaur	Jumlah bibit yang dibuat						25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	25.000 batang	50.000.000	75.000 batang	150.000.000
		Demplot Agroforestry	Jumlah demplot yang tersedia						1 unit 2 ha	75.000.000					1 unit 2 ha	75.000.000
		Penghijauan Hutan Mangrove/Hutan Pantai	Luas Hutan Mangrove hutan pantai yang dilakukan penghijauan						10 ha	105.000.000					10 ha	105.000.000
		Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan						1 Kegiatan	150.000.000					1 Kegiatan	150.000.000

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Jumlah dokumen informasi lingkungan dan kehutanan Provinsi Bengkulu	2 Dokumen	2 dokumen	100.000.000	3 dokumen, 2 edisi	200.000.000	3 dokumen, 2 edisi	200.000.000	3 dokumen, 2 edisi	200.000.000	3 dokumen, 2 edisi	200.000.000	16 dokumen, 8 edisi	900.000.000
		Penyusunan Status Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)	Tersedianya Data dan Informasi lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	500.000.000
		IKLH Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen IKLH yang disusun				1 Dokumen IKLH	50.000.000	1 Dokumen IKLH	50.000.000	1 Dokumen IKLH	50.000.000	1 Dokumen IKLH	50.000.000	4 Dokumen IKLH	200.000.000
		Jurnal Lingkungan	Jumlah Terbitan Jurnal				2 Edisi	50.000.000	2 Edisi	50.000.000	2 Edisi	50.000.000	2 Edisi	50.000.000	8 Edisi	200.000.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling. Hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara		54	1.045.200.000	54	750.000.000	54	750.000.000	54	750.000.000	54	750.000.000	54	4.045.200.000
		Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah event-event kegiatan-kegiatan hari lingkungan di Provinsi Bengkulu	3 event	3 event	95.000.000									6 event	95.000.000
		Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)	Prosentase usaha servis AC dan Kulkas yang didata dan diawasi di Kabupaten/Kota	90%	90%	65.000.000									90%	65.000.000
		Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penerimaan Izin Lingkungan	Jumlah Pemegang Izin Lingkungan yang diawasi Kegiatan Pengelolaan Lingkungannya	30 Perusahaan/ Pelaku Usaha	30 Perusahaan/ Pelaku Usaha	135.200.000									60 Perusahaan/ Pelaku Usaha	135.200.000
		Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Jumlah Kota/Kabupaten Sehat yang dinilai	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100.000.000	4 Kab/Kota	100.000.000	4 Kab/Kota	100.000.000	4 Kab/Kota	100.000.000	4 Kab/Kota	100.000.000	24 Kab/Kota	500.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target (Rp)	Target (Rp)	(Rp)	Target (Rp)	(Rp)	Target (Rp)	(Rp)	Target (Rp)	(Rp)	Target (Rp)	(Rp)
		Inventarisasi kualitas air sungai dan perhitungan beban pencemar	Dokumen Status Mutu dan analisa Beban Pencemaran air sungai	3 Sungai	3 Sungai	150.000.000	3 Sungai	150.000.000	3 Sungai	150.000.000	3 Sungai	150.000.000	3 Sungai	150.000.000	18 Sungai	750.000.000
		Pemantauan Kualitas udara Ambient	Terukurnya kualitas Udara Ambien 10 Kab/Kota di Provinsi Bengkulu	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	150.000.000	7 Kab/Kota	150.000.000	7 Kab/Kota	150.000.000	7 Kab/Kota	150.000.000	7 Kab/Kota	150.000.000	42 Kab/Kota	750.000.000
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Perusahaan yang diawasi atau pemegang izin dan Jumlah kasus yang diselesaikan	15 Perusahaan/ 90 Kasus	15 Perusahaan/ 90 Kasus	200.000.000	15 Perusahaan/ 90 Kasus	200.000.000	15 Perusahaan/ 90 Kasus	200.000.000	15 Perusahaan/ 90 Kasus	200.000.000	15 Perusahaan/ 90 Kasus	200.000.000	90 Perusahaan/ 540 Kasus	1.000.000.000
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang dibina untuk mendapat Penghargaan adiwiyata daerah dan Nasional	15 Sekolah	15 Sekolah	150.000.000	15 Sekolah	150.000.000	15 Sekolah	150.000.000	15 Sekolah	150.000.000	15 Sekolah	150.000.000	90 Sekolah	750.000.000
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		3 Alat Instalasi	190.000.000	1 Dokumen	200.000.000		0	100 ha	1.000.000.000		0	3 Alat Instalasi, 1 dokumen, 100 ha	1.390.000.000
		Pemanfaatan Limbah (Bio gas dan Bio Elektrik)	Jumlah Instalasi Bio gas dan Bio Elektrik		3 Alat Instalasi	190.000.000									3 Alat Instalasi	190.000.000
		Inisiasi dan Studi Kelayakan TPA Regional	Jumlah Dokumen Inisiasi dan Studi Kelayakan TPA Regional yang disusun				1 Dokumen	200.000.000							1 Dokumen	200.000.000
		Pembebasan Lahan TPA Regional BENTENG KOBEMA	Luas Lahan yang dibebaskan								100 ha	1.000.000.000			100 ha	1.000.000.000
		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan			-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	89000000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.000.000	4 dokumen	404.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kerusakan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kerusakan DAS yang di susun				1 Dokumen	100.000.000							1 dokumen	100.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksa-naan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen yang dihasilkan						1 dokumen	89.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	110.000.000	3 dokumen	304.000.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase laju deforestasi dari luas tutupan lahan yang berhutan pada kawasan hutan.	71,06% (657.049,79 ha)	70,79% (654.546,28 ha)	935.000.000	70,53%	5.010.080.000	70,26%	1.275.000.000	70,00%	1.275.000.000	69,74%	1.275.000.000	69,74%	9.770.080.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Provinsi Bengkulu	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses	3 Kasus	3 Kasus	150.000.000	3 Kasus	150.000.000	3 Kasus	180.000.000	3 Kasus	180.000.000	3 Kasus	180.000.000	18 Kasus	840.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Muko-muko	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	125.000.000	2 Kasus	125.000.000	2 Kasus	125.000.000	10 Kasus	575.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu Utara	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	10 Kasus	515.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit Daun	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	250.000.000	2 Kasus	250.000.000	2 Kasus	250.000.000	10 Kasus	950.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	10 Kasus	515.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Seluma	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	10 Kasus	515.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	150.000.000	2 Kasus	150.000.000	2 Kasus	150.000.000	10 Kasus	650.000.000
		Kegiatan Pengamanan dan penyelesaian kasus kehutanan Wilayah KPH Kaur	Jumlah Kasus Tiphut yang diproses		2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	100.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	2 Kasus	105.000.000	10 Kasus	515.000.000
		Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan	Penurunan jumlah titik hotspot berkurang setiap tahun		2%	85.000.000	2%	85.000.000	2%	150.000.000	2%	150.000.000	2%	150.000.000	2% Titik	620.000.000
		Kegiatan Sarana dan Prasarana KPH dan RHL (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH yang dibangun				16 Unit	3.390.000.000							16 Unit	3.390.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
		Facilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Danau Dusun Besar	Jumlah Dokumen yang dihasilkan					1 dokumen	685.080.000							1 dokumen	685.080.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ling. Hidup	Jumlah dokumen pengendalian dan perusakan LH yg tersedia	5 dokumen	5 dokumen	525.000.000	10 dokumen	1.975.000.000	7 dokumen	600.000.000	5 dokumen	400.000.000	5 dokumen	400.000.000	10 dokumen	3.900.000.000	
		Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RTRW Provinsi Bengkulu dan RZWP3K Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen KLHS yan disusun				2 Dokumen	600.000.000							2 Dokumen	600.000.000	
		Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Profil Kehati Provinsi Bengkulu	Jumlah Dokumen Profil Kehati Provinsi Bengkulu disusun				1 Dokumen	125.000.000							1 Dokumen	125.000.000	
		Pembinaan Komunitas Cinta Lingkungan Wisata (KCLW)	Jumlah Komunitas yang dibina				3 Kelompok	50.000.000							3 Kelompok	50.000.000	
		Penyusunan AMDAL Kawasan Ekonomi Khusus	Dokumen Izin Lingkungan KEK yang disusun				1 Dokumen	300.000.000							1 Dokumen	300.000.000	
		Penyusunan AMDAL Pengembangan Kawasan Pelabuhan P.Bai	Dokumen Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pulau Bai yang disusun				1 Dokumen	300.000.000							1 Dokumen	300.000.000	
		KLHS Danau Dendam	Jumlah Dokumen KLHS yan disusun						1 dokumen	150.000.000					1 dokumen	150.000.000	
		Validasi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang divalidasi						2 dokumen	50.000.000					2 dokumen	50.000.000	
		Komisi Penilai dan Evaluasi Lisensi AMDAL	Persentase Penilaian Dokumen AMDAL	100 Persen	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	375.000.000	
		Penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH	Dokumen Naskah Akademik RPPLH Provinsi Bengkulu	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000							1 Dokumen	400.000.000	
		Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Jumlah MHA yang diinventarisir				3 MHA	75.000.000	3 MHA	75.000.000	3 MHA	75.000.000	3 MHA	75.000.000	12 MHA	300.000.000	
		Program Kampung Iklim (Proklim)	Proses Pemahaman tentang Kampung Iklim	3 Kampung	3 Kampung	100.000.000	3 Kampung	100.000.000	3 Kampung	100.000.000	3 Kampung	100.000.000	3 Kampung	100.000.000	18 Kampung	500.000.000	
		Inventarisasi dan Pengendalian RAD Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Bengkulu	Dokumen Inventarisasi dan Pengendalian RAD GRK	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	18 Dokumen	750.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Sampel Udara dan Air yang diperiksa			200.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	325.000.000	20 Kali	325.000.000	20 Kali	325.000.000	80 Kali	1.575.000.000	
		Bimtek peningkatan kapasitas SDM Laboratorium	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek				60 orang	75.000.000							60 orang	75.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Alat yang Terkalibrasi dan Bahan Kimia Lab	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	6 Paket	1.000.000.000	
		Pelaksanaan Akreditasi parameter analisa Laboratorium	Jumlah Parameter Analisa Laboratorium yang diakreditasi				20 Parameter	125.000.000	20 Parameter	125.000.000	20 Parameter	125.000.000	20 Parameter	125.000.000	80 Parameter	500.000.000	
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan	15 Sertifikat	15 Sertifikat	700.000.000	15 Sertifikat	700.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	75 Sertifikat	2.000.000.000	
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan	15 Sertifikat	15 Sertifikat	700.000.000	15 Sertifikat	700.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	10 Sertifikat	200.000.000	75 Sertifikat	2.000.000.000	
	Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) meningkat setiap tahun	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						14 potensi	1.750.000.000	14 potensi	2.100.000.000	14 potensi	2.310.000.000	42 potensi	6.160.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Mukomuko	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit Daun	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Seluma	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	
		Kegiatan Pengembangan Potensi HHBK pada KPH Kaur	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000	

Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					2016	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Mukomuko	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bengkulu Utara	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit Daun	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bukit Balai Rejang	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Seluma	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Bengkulu Selatan	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan pada KPH Kaur	Jumlah Potensi Hasil Hutan yang dikembangkan						1 potensi	125.000.000	1 potensi	150.000.000	1 Potensi/tahun	165.000.000	3 Potensi	440.000.000
		JUMLAH				9.390.453.000		22.032.133.000		16.525.053.000		16.531.053.000		15.771.053.000		80.249.745.000

Bengkulu, Januari 2017

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BENGKULU

Ir. AGUS PRIAMBUDI, M.Sc
NIP. 19610829 198703 1 001

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu pada :

- a. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah.
- b. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menetapkan beberapa indikator kinerja OPD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase KPH yang memproduksi Barang dan Jasa	-		-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kawasan Hutan yang dikelola melalui perhutanan sosial		40%	50%	55%	65%	70%	75%	75%
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			66	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
4	Persentase penurunan Emisi gas Rumah Kaca (GRK)			29%	29%	29%	29%	29%	29%
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat setiap tahun			2%	2%	2%	2%	2%	2%
6	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan			20%	20%	20%	20%	20%	20%
7	Nilai Evaluasi SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L).

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah serta bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) OPD juga menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya.

Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dalam menyusun Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu selama periode 2016-2021

Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepala OPD kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Bengkulu, Januari 2017

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU

Ir. AGUS PRIAMBUDI, M.Sc
NIP. 19610829 198703 1 001.